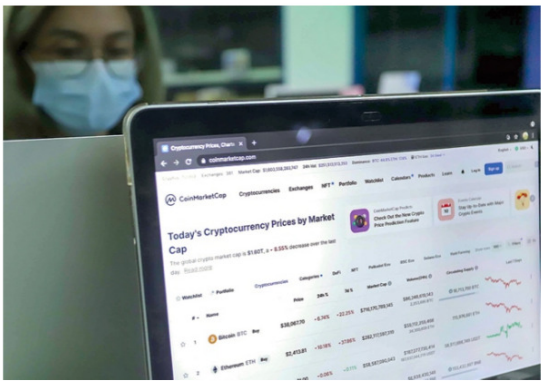
Wamendag: Kewenangan Atur Perdagangan Kripto Lebih Tepat Di Bappebti

Tanggal	: Kamis , 03 Juni 2021
Media	: Jawapos.com
Halaman	: 2
Wartawan	: Romys Binekasri
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Jerry Sambuaga *(Wakil Menteri Perdagangan)*
Rubrik	: finance
Topik	: Kripto

Wamendag: Kewenangan Atur Perdagangan Kripto Lebih Tepat di Bappebti

FINANCE 3 Juni 2021, 10:15:32 WIB



TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)

JawaPos.com – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry sambuaga menekankan bahwa mata uang digital atau kripto adalah salah satu aset digital yang masuk kategori sebagai komoditas dalam perdagangan. Oleh karena itu, kripto sudah tepat diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti.

"Aset kripto bukan mata uang atau alat pembayaran menurut hukum Indonesia. Ia merupakan aset digital yang bisa diperdagangkan sebagai komoditas. Karena itu, ini masuk dalam kewenangan pengaturan oleh Bappebti," kata Jerry dalam keterangannya, Kamis (3/6).

Kementerian Perdagangan sendiri menyebut bahwa kripto adalah jenis pengembangan aset digital yang relatif baru dan perlu diakomodasi pengaturannya dalam sistem perdagangan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari penggunaan yang makin luas, prospek diversifikasi penggunaan dan dampaknya bagi perekonomian nasional secara umum.

Mengingat dampaknya yang begitu luas, Jerry memahami mengapa regulator lain ingin mengawasi dan mengatur kripto. Ia berharap perdagangan kripto bisa ditinjau dari berbagai aspek sehingga produktif bagi pengembangan perdagangan dan ekonomi Indonesia.

"Saya kira memang ini bisa dilihat sebagai urusan lintas sektor. Tetapi jelas dalam hal perdagangannya adalah wewenang Bappebti," tuturnya.

Seperti diketahui, aset kripto saat ini diperdagangkan dengan omzet sekitar Rp 1,5 triliun per hari di Indonesia. Menurutnya, ini potensi yang cukup besar sehingga harus ada kehati-hatian dalam pengaturannya.

Bappebti berencana untuk mendirikan bursa komoditas untuk aset kripto. Saat ini aturan-aturannya sedang digodok dan direncanakan bursa akan berdiri pada semester kedua tahun ini.

Jika itu terwujud, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang mendirikan bursa kripto yang diatur oleh pemerintah. Menurut data, ada sekitar 8.000-9.000 jenis aset kripto saat ini.

Bappebti telah merilis sekitar 229 aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia. Jumlah jenis kripto yang bisa diperdagangkan bisa bertambah atau berkurang tergantung hasil pengawasan dan evaluasi yang terus dilakukan secara berkala.

Jerry mengatakan, saat ini Bappebti terus meningkatkan kapasitas dalam pengaturan aset kripto. Mereka menggandeng berbagai *stakeholders* termasuk pelaku perdagangan langsung.

"Pada intinya, pengaturan perdagangan aset kripto bertujuan mencapai beberapa hal. Pertama, kepastian hukum mengenai aset kripto itu sendiri. Kedua, perlindungan pedagang dan semua pihak yang terlibat" katanya. Terakhir, menjadi upaya mengoptimalkan kebermanfaatannya bagi ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat.